

# TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum

Volume 07 Nomor 01, Maret 2025

DOI: <https://doi.org/10.35961/teraju.v7i01.1877>

## Implementasi Asas Pruden Pada Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Oleh BRI Kantor Cabang Duri

**Halimatun Sakdiah Purba**

Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia

[sakdiahpurba1@gmail.com](mailto:sakdiahpurba1@gmail.com)

**Iriansyah**

Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia

[iriansyah@unilak.ac.id](mailto:iriansyah@unilak.ac.id)

**Yetti**

Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia

[yetti@unilak.ac.id](mailto:yetti@unilak.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi asas prudensial dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang KC Duri, serta mengidentifikasi hambatan yang muncul dalam proses penyaluran kredit. Asas prudensial, yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan, mengharuskan pemberian kredit dilakukan dengan prinsip kehati-hatian untuk mengurangi risiko kerugian bagi bank dan nasabah. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan metode wawancara, survei, dan observasi langsung di lapangan, melibatkan manajer kredit serta nasabah UMKM sebagai informan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun BRI KC Duri telah berupaya mengimplementasikan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran KUR, hambatan signifikan tetap ditemukan. Hambatan utama meliputi kesulitan administratif, seperti ketidakmampuan pelaku UMKM dalam menyediakan dokumen lengkap dan laporan keuangan yang memadai. Kendala lain terkait analisis kelayakan kredit yang rumit, terutama bagi UMKM tanpa catatan keuangan yang jelas, serta risiko kredit bermasalah akibat ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Solusi yang diajukan meliputi penyederhanaan prosedur administrasi, pendampingan keuangan bagi pelaku UMKM, serta penyempurnaan regulasi untuk mendukung penerapan asas

prudensial yang lebih fleksibel. Implementasi solusi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyaluran KUR, sekaligus menjaga keseimbangan antara perlindungan hak-hak pelaku UMKM dan kepentingan bank dalam menjaga kesehatan portofolio kredit

*Kata Kunci: Asas Prudensial Banking, Kredit Usaha Rakyat (KUR), UMKM, Penyaluran Pinjaman*

### Abstract

*This study aims to analyze the implementation of prudential principles in providing People's Business Credit (KUR) to Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) at the Bank Rakyat Indonesia (BRI) KC Duri Branch Office and to identify obstacles encountered in the credit distribution process. The prudential principle, regulated under the Banking Law, requires credit provision to be carried out with caution to minimize risks for both banks and customers. A qualitative approach was used in this study, employing interviews, surveys, and direct field observations involving credit managers and MSME customers as key informants. The results reveal that although BRI KC Duri has made efforts to implement prudential principles in KUR distribution, significant obstacles persist. The main challenges include administrative difficulties, such as the inability of MSME players to provide complete documents and adequate financial reports. Other issues involve complex creditworthiness analysis, particularly for MSMEs without clear financial records, and credit risk problems due to debtors' inability to fulfill repayment obligations. Proposed solutions include simplifying administrative procedures, providing financial assistance to MSME players, and refining regulations to support more flexible application of prudential principles. Implementing these solutions is expected to enhance the effectiveness of KUR distribution while maintaining a balance between protecting MSME rights and safeguarding the bank's credit portfolio health.*

*Keywords: Prudential Banking Principle, People's Business Credit, MSME, Loan Disbursement*



<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Email koresponden: [sakdiahpurba1@gmail.com](mailto:sakdiahpurba1@gmail.com)

### Pendahuluan

Perekonomian nasional memiliki peranan penting dalam pembangunan suatu negara karena berdampak pada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 disebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi dengan asas kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan

kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dalam hal ini, lembaga keuangan perbankan memegang peranan signifikan sebagai infrastruktur yang mengumpulkan dan menyalurkan dana untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Suharto Pramesti Harmar, Muhammad Iqbal Fasa, "Peran Perbankan Syariah Dalam UMKM Untuk Mengembangkan Ekonomi Indonesia," *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan* 5, no. 1 (2021): 68–77.

Perekonomian Indonesia sangat bergantung pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang sekitar 60,3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97% tenaga kerja nasional. Namun, salah satu kendala utama dalam pengembangan UMKM adalah terbatasnya akses terhadap permodalan, yang menyebabkan kesulitan dalam ekspansi usaha

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor usaha yang terus bertumbuh di Indonesia. Secara historis, UMKM telah menunjukkan ketahanannya, terutama selama krisis ekonomi 1998, di mana sektor ini mampu menyerap 99,45% total angkatan kerja, yaitu sekitar 73,24 juta tenaga kerja.<sup>2</sup> Kontribusi UMKM selama masa krisis ini dianggap sebagai salah satu elemen penting dalam proses pemulihan ekonomi nasional. Menurut Suryadharna Ali, UMKM adalah benteng perekonomian nasional. Mengabaikan sektor ini berarti melemahkan benteng tersebut. Oleh karena itu, pemerintah merumuskan kebijakan untuk memberdayakan UMKM melalui sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Salah satu langkah strategisnya adalah penerapan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang bertujuan meningkatkan pemberdayaan sektor UMKM.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> A Kholifah and T Andini, "Peran UMKM Terhadap Perekonomian Di Indonesia," *Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 3, no. 2 (2024): 459–466.

<sup>3</sup>Felix Sevanov Gilbert and Wiji Setiyani., "Pemberdayaan UMKM Sebagai Penggerak Pemulihan Ekonomi Nasional Melalui Optimalisasi Digital 4.0," *Global Komunika* 5, no. 1 (2022).

Dalam penerapannya, pemerintah memiliki komitmen kuat untuk membantu UMKM, baik dalam hal peningkatan sumber daya manusia, permodalan, maupun akses pasar. Salah satu wujud konkrit dari kebijakan ini adalah penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang menjadi instrumen penting dalam mendukung pengembangan UMKM. Namun, pelaksanaan KUR ini tidak terlepas dari penerapan asas kehati-hatian perbankan (*pruden banking*). Pemerintah melalui kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berusaha memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah kepada UMKM. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menjadi salah satu bank yang ditunjuk untuk menyalurkan KUR. Meskipun demikian, penyaluran KUR masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam hal penerapan asas kehati-hatian perbankan (*pruden banking*) yang penting untuk memastikan kelayakan kredit yang diberikan. Asas ini bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan dengan memastikan bahwa bank memberikan kredit hanya kepada debitur yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mengembalikan pinjaman.

Asas pruden banking bertujuan menjaga stabilitas sistem keuangan dengan memastikan bank memberikan kredit secara hati-hati dan bertanggung jawab. Dalam konteks KUR, prinsip ini menuntut bank untuk memperhatikan kelayakan usaha penerima kredit, kemampuan pembayaran, serta pemantauan berkelanjutan terhadap nasabah. Dengan demikian, asas ini memastikan kebijakan kredit tetap selaras dengan tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.<sup>4</sup> Dalam penyaluran KUR, pemerintah juga mengambil langkah

---

<sup>4</sup>and Elvitrianim Purba Suginam, Sri Rahayu, "Efektivitas Penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) Untuk Pengembangan UMKM," *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)* 3, no. 1 (2021): 21–28..

strategis dengan menurunkan suku bunga kredit secara bertahap dari 20% menjadi 6%. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akses UMKM terhadap pembiayaan yang lebih terjangkau, sekaligus mempercepat pengembangan sektor riil dan penanggulangan kemiskinan. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi bank dalam menyalurkan KUR. Salah satunya adalah kesalahpahaman masyarakat yang menganggap KUR sebagai dana hibah pemerintah, sehingga tidak memperhatikan kewajiban pengembalian kredit. Hal ini menyebabkan peningkatan risiko kredit macet yang berdampak sistemik pada sistem perbankan.<sup>5</sup>

Selain itu, bank juga harus memastikan bahwa proses analisis kredit dilakukan dengan cermat. Sebelum memberikan pinjaman, bank harus menganalisis kemampuan kreditur dalam membayar kembali pinjamannya sesuai perjanjian. Prosedur ini bertujuan untuk memitigasi risiko kredit macet, yang dapat memengaruhi kinerja operasional bank secara keseluruhan. Proses pengawasan terhadap bank dilakukan oleh Bank Indonesia melalui Pasal 29 Undang-undang No. 10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank dengan mematuhi ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, manajemen, likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas. Selain itu, bank juga wajib memberikan informasi risiko kepada nasabah terkait transaksi yang dilakukan.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Maisa, "Analisis Yuridis Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat," *Maleo Law Journal* 2, no. 2 (2020).

<sup>6</sup> Gesang Iswahyudi Hakam Ahmad, Sri Anggraini, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Rahasia Bank Dalam Menjaga Kepentingan Nasabah Perbankan," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 337–350.

Hubungan antara bank dan debitur didasarkan pada rasa saling percaya, yang kemudian dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit. Perjanjian ini bersifat saling menguntungkan, di mana debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disepakati.<sup>7</sup> Namun, pemohon KUR sering kali menghadapi kendala dalam memenuhi persyaratan administrasi, seperti dokumen perizinan usaha, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), laporan keuangan, hingga pembebanan biaya asuransi. Selain itu, Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) juga menjadi tantangan bagi calon debitur untuk mengakses KUR.<sup>8</sup>

Kendala lainnya adalah kebutuhan akan jaminan tambahan, yang sering kali menjadi penghalang bagi UMKM. Padahal, sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023, tidak ada jaminan tambahan yang berlaku untuk KUR dengan plafon hingga Rp100 juta. Namun, pelanggaran terhadap aturan ini masih sering terjadi. Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, penting bagi bank untuk terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap debitur KUR. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa kebijakan yang ada dapat diimplementasikan dengan baik sehingga benar-benar mendukung pengembangan UMKM.<sup>9</sup> Meskipun asas pruden banking

<sup>7</sup> Frengky Banefar, "Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Dengan Jaminan Sertifikat Tanah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996: Studi Pada Bank Papua Cabang Biak," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 3, no. 1 (2020): 17–40.

<sup>8</sup> Hadi Rahman, "Ragam Pengaduan Masyarakat Dalam Penyaluran KUR," *ombudsman RI* (2023).

<sup>9</sup> Israil Lapangga, "Pengaruh Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pada Nasabah BRI Unit Masama," *Jurnal Ilmiah Clean Government* vol.5 No.1(2022).

diterapkan dalam penyaluran KUR, berbagai masalah muncul, seperti kredit macet, kesalahpahaman masyarakat mengenai KUR, serta kendala administratif yang harus dipenuhi oleh pelaku UMKM. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis bagaimana implementasi asas pruden banking dilakukan oleh PT BRI KC Duri dalam menyalurkan KUR dan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang ada dalam proses tersebut. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang "Implementasi Asas Pruden Banking pada Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Duri".

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini akan mengkaji implementasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang KC Duri. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana proses penyaluran KUR dilaksanakan, serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi oleh bank dalam menyalurkan KUR kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mencari solusi yang relevan terhadap kendala-kendala yang muncul dalam proses penyaluran KUR. Lebih lanjut, penelitian ini juga akan mengkaji upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh PT BRI untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyaluran KUR, sehingga lebih banyak pelaku UMKM yang dapat memanfaatkannya untuk pengembangan usaha mereka.

Meskipun penerapan asas kehati-hatian dalam penyaluran KUR sudah diterapkan, masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya yang menyebabkan

terjadinya kredit macet dan kesalahpahaman dari pemohon mengenai kewajiban pengembalian kredit.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologi, yang bertujuan untuk memahami berfungsinya hukum dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya mengungkap efektivitas penegakan hukum di masyarakat serta mengidentifikasi hukum tidak tertulis yang berlaku di masyarakat. Jenis penelitian ini relevan karena memberikan gambaran mendalam mengenai penerapan asas pruden banking dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi metode yuridis empiris, studi kepustakaan, dan pendekatan lapangan. Metode yuridis empiris digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Studi kepustakaan dilakukan dengan menganalisis literatur terkait asas pruden banking, teori hukum, dan kebijakan penyaluran KUR. Pendekatan lapangan dilakukan untuk mendapatkan data empiris dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Duri, yang melibatkan wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak terkait, termasuk nasabah KUR dan Bank.

Lokasi penelitian ini dipilih di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Duri. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada banyaknya pelaku UMKM yang mengakses KUR di wilayah tersebut. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer, yang diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara, serta data sekunder yang berasal dari dokumen resmi, literatur, dan peraturan terkait.

## 1. Implementasi Asas *Pruden pada Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR)* oleh di BRI Kantor Cabang Duri

Implementasi asas kehati-hatian atau *pruden banking* dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan langkah penting untuk mengurangi risiko kredit bermasalah dan memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan kepada debitur dapat dikelola dengan baik. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang KC Duri menerapkan prinsip ini melalui analisis yang mendalam terhadap calon debitur, termasuk penilaian berdasarkan lima aspek utama yang dikenal sebagai 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral*).

Pada penerapan asas prudential banking dalam pemberian KUR di BRI KC Duri, asas kehati-hatian diterapkan dengan melakukan analisis risiko yang ketat pada setiap calon debitur. Bank BRI menggunakan metode verifikasi yang menyeluruh, termasuk analisis kelayakan usaha dan kemampuan membayar dari pihak peminjam. Asas prudensial ini memastikan bahwa kredit yang diberikan tidak hanya menguntungkan pihak bank tetapi juga terjamin keberlanjutannya, meminimalisir risiko kredit macet.

Proses analisis ini dimulai dengan evaluasi karakter debitur untuk mengetahui sejauh mana calon debitur memiliki itikad baik dalam memenuhi kewajiban finansialnya. Bank BRI KC Duri menilai karakter melalui wawancara langsung, verifikasi riwayat kredit, dan pengumpulan informasi dari lingkungan sosial calon debitur. Penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon debitur memiliki komitmen untuk mengembalikan kredit sesuai dengan perjanjian.<sup>10</sup>

Selain itu, aspek kapasitas juga menjadi fokus utama. Dalam hal ini, Bank

BRI KC Duri menilai kemampuan debitur untuk menjalankan usaha yang diajukan sebagai dasar pengajuan kredit. Kemampuan ini mencakup potensi pendapatan dari usaha, sumber pendapatan lain, serta kondisi keluarga yang dapat memengaruhi keuangan debitur. Evaluasi ini dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan, riwayat usaha, serta wawancara langsung dengan calon debitur.<sup>11</sup> Aspek modal juga diperiksa secara mendalam untuk memastikan bahwa calon debitur memiliki dana yang cukup untuk mendukung operasional usahanya. Bank BRI KC Duri melakukan pengecekan terhadap laporan keuangan debitur untuk menilai kelayakan modal yang dimiliki. Modal yang memadai menjadi indikator penting dalam mengurangi risiko gagal bayar yang dapat merugikan bank.<sup>12</sup>

Penilaian aspek kondisi usaha juga diterapkan untuk melihat stabilitas usaha debitur di tengah dinamika pasar. Bank BRI KC Duri memantau faktor-faktor eksternal seperti lokasi usaha, keberadaan kompetitor, dan potensi pengembangan usaha debitur. Analisis kondisi ini memastikan bahwa usaha yang didanai memiliki prospek yang baik untuk bertahan dan berkembang. Selain itu, aspek jaminan atau collateral turut diperhatikan, meskipun untuk KUR mikro tidak mewajibkan agunan tambahan<sup>13</sup>. Bank BRI KC Duri tetap menerima agunan berupa barang elektronik, kendaraan bermotor, atau aset lainnya sebagai data tambahan dalam proses evaluasi. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa risiko kredit dapat

<sup>11</sup> Wawancara dengan Analis Micro Bank BRI KC Duri, 26 November 2024

<sup>12</sup> Wawancara dengan Marketing BRI KC Duri, 27 November 2024

<sup>13</sup> Yakub, "Analisis Proses Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Guna Meminimalisir Nasabah NPL (Non-Performing Loan) Pada PT. Bank Sulselbar Cabang Sidrap," *Community Development Journal* 5, no. 5 (2024 5, no. 5 (2024).

<sup>10</sup> Wawancara dengan Pimpinan Cabang Bank BRI Duri, 25 November 2024

diminimalkan, terutama untuk kredit dengan nominal lebih besar.<sup>14</sup>

Untuk memperkuat implementasi asas kehati-hatian, Bank BRI KC Duri mengintegrasikan teknologi untuk meningkatkan efisiensi proses evaluasi. Sistem otomatis digunakan untuk memverifikasi data debitur dan menyederhanakan analisis laporan keuangan.<sup>15</sup> Selain itu, bank menekankan transparansi dalam proses evaluasi kredit dengan menyediakan panduan yang jelas serta pembaruan rutin kepada debitur terkait aplikasi kredit mereka. Pemantauan dan dukungan berkala juga menjadi bagian integral dari pendekatan bank. Bank BRI KC Duri melakukan kunjungan rutin ke usaha debitur untuk memastikan bahwa dana dimanfaatkan secara efektif dan memberikan panduan dalam pengelolaan keuangan. Pendekatan proaktif ini tidak hanya mengurangi risiko kredit macet, tetapi juga mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM.

Melalui penerapan prinsip 5C yang ketat, dikombinasikan dengan inovasi berkelanjutan dan dukungan kepada debitur, Bank BRI KC Duri telah membangun fondasi yang kuat dalam mengimplementasikan asas kehati-hatian dalam operasional kreditnya. Hal ini memastikan bahwa program KUR tidak hanya berkontribusi pada pembangunan ekonomi tetapi juga selaras dengan komitmen bank untuk menjaga stabilitas keuangan dan membangun kepercayaan dengan nasabahnya.

## 2. Prosedur Penyaluran KUR di Bank BRI KC Duri

Prosedur penyaluran KUR di Bank BRI KC Duri diawali dengan proses seleksi calon debitur yang memenuhi persyaratan administratif, seperti laporan keuangan, dokumen usaha, dan izin usaha. Setelah itu, dilakukan proses verifikasi data calon debitur untuk memastikan kelayakan usaha dan kemampuan pembayaran. Bank BRI KC Duri juga menerapkan survei lapangan untuk menilai lokasi usaha dan kondisi pasar di sekitar lokasi usaha debitur. Proses seleksi administrasi ini dilakukan secara bertahap, dimulai dengan pengajuan dokumen utama seperti KTP, NPWP, dan izin usaha. Setelah dokumen utama diterima, tim bank akan melakukan pengecekan silang untuk memastikan keabsahan data dan menilai riwayat kredit calon debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Proses ini bertujuan untuk memitigasi risiko yang dapat muncul dari debitur dengan riwayat kredit bermasalah.

Setelah calon debitur dinyatakan layak, proses pencairan KUR dilakukan dengan pengawasan ketat untuk memastikan bahwa dana yang diberikan digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Dana disalurkan secara bertahap berdasarkan kebutuhan usaha dan rencana bisnis yang diajukan. Bank juga melakukan evaluasi penggunaan dana melalui laporan perkembangan usaha yang harus diserahkan secara berkala oleh debitur. Proses penyaluran ini didukung oleh aplikasi internal yang mempermudah pengumpulan data nasabah secara elektronik. Aplikasi ini memungkinkan bank untuk memantau real-time penggunaan dana oleh debitur sehingga transparansi dapat terjaga. Dengan sistem ini, tim bank dapat langsung mengidentifikasi potensi penyimpangan dalam penggunaan dana dan memberikan intervensi yang diperlukan untuk

<sup>14</sup> Wawancara dengan Pimpinan Cabang Bank BRI Duri, 25 November 2024

<sup>15</sup> Ade Hari Siswanto, "Perlindungan Hukum Digitalisasi Transaksi Keuangan (Financial Technology) Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku," *Lex Jurnalica* 1, no. 1 (2022): 1–15.

mengarahkan kembali dana ke tujuan semula.

Bank BRI KC Duri juga memberikan pelatihan kepada debitur untuk memastikan bahwa dana yang diterima dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pengembangan usaha. Pelatihan ini mencakup manajemen keuangan dasar, perencanaan bisnis, dan strategi pemasaran. Selain itu, bank menyediakan akses ke mentor bisnis yang dapat membantu debitur menghadapi tantangan operasional sehari-hari. Dalam upaya meningkatkan efisiensi, bank mengembangkan sistem digital untuk mempercepat proses evaluasi kredit. Sistem ini memungkinkan analisis data secara otomatis dan menghasilkan laporan yang membantu pengambilan keputusan kredit dengan cepat.<sup>16</sup> Digitalisasi juga membantu mengurangi biaya operasional, sehingga dapat dialokasikan untuk mendukung pelaku UMKM yang membutuhkan pendampingan intensif.

Bank BRI KC Duri tidak hanya fokus pada proses pencairan, tetapi juga melakukan pemantauan berkala terhadap perkembangan usaha debitur. Pemantauan ini dilakukan melalui kunjungan lapangan dan komunikasi aktif dengan debitur. Hal ini memastikan bahwa usaha yang didanai berjalan sesuai rencana dan memiliki potensi untuk berkembang. Jika ditemukan kendala dalam operasional usaha, tim bank akan memberikan solusi berupa restrukturisasi kredit atau pendampingan tambahan.<sup>17</sup> Dengan

kombinasi antara teknologi modern, pelatihan, dan pengawasan aktif, Bank BRI KC Duri mampu meningkatkan efektivitas penyaluran KUR. Proses yang terstruktur ini tidak hanya mendukung pertumbuhan UMKM, tetapi juga memperkuat kepercayaan debitur terhadap bank sebagai mitra bisnis yang andal

Prosedur penyaluran KUR di BRI KC Duri dimulai dari pengajuan aplikasi oleh calon debitur, yang kemudian melalui proses verifikasi dan analisis kelayakan usaha. Setelah verifikasi data, proses selanjutnya adalah penentuan plafon kredit, diikuti dengan pencairan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses ini dilakukan secara sistematis dan mengikuti aturan yang ketat untuk memastikan bahwa hanya debitur yang memiliki potensi usaha yang tinggi yang dapat mengakses fasilitas KUR.

Prosedur yang ada cukup baik, namun masih ada beberapa kendala, seperti lamanya proses verifikasi yang dapat memperlambat pencairan. Beberapa langkah dalam prosedur ini bisa lebih dipercepat tanpa mengurangi kualitas analisis risiko, salah satunya dengan menggunakan sistem digitalisasi yang lebih terintegrasi. Prosedur ini juga sudah cukup sejalan dengan prinsip prudential banking, yang memastikan proses seleksi dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan data yang valid.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah meningkatkan penggunaan teknologi untuk mempercepat proses verifikasi dan analisis data. Misalnya, pengintegrasian sistem digital untuk memverifikasi data calon debitur secara otomatis dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menilai kelayakan peminjam dan mempercepat pencairan dana

<sup>16</sup> Erni Prasetyani et al., "Efektivitas 'Digital Lending' Pada Lending Model (Studi Kasus Kredit Usaha Rakyat Bank Mandiri)," *Abinvara: Jurnal Vokasi Administrasi Bisnis* 5, no. 2 (2024): 127–134.

<sup>17</sup> Georgius Ivan Budihardja, "Kebijakan Restrukturisasi Kredit Oleh Bank Terhadap Debitur UMKM Terdampak Langsung Maupun Tidak Langsung Pandemi Covid-19," *Jurist-Diction* 5, no. 4 (2022): 1313–1346.

### 3. Hambatan dalam Penyaluran KUR

Penyaluran KUR kepada pelaku UMKM di BRI KC Duri menghadapi beberapa hambatan, antara lain:

- a. Persyaratan Administrasi: Banyak pelaku UMKM yang kesulitan memenuhi persyaratan administratif, seperti laporan keuangan yang lengkap dan izin usaha. Hal ini menjadi kendala utama dalam proses pengajuan KUR.
- b. Kurangnya Pemahaman Debitur: Sebagian pelaku UMKM tidak memahami tata cara pengajuan kredit, sehingga mereka kesulitan dalam menyusun dokumen yang diperlukan.
- c. Risiko Kredit Bermasalah: Risiko ini sering kali muncul akibat keterlambatan pembayaran angsuran oleh debitur. Untuk mengatasi hal ini, Bank BRI KC Duri melakukan pendekatan langsung kepada debitur dan memberikan opsi restrukturisasi kredit.
- d. Minimnya Jaminan: Beberapa debitur menghadapi kesulitan dalam menyediakan jaminan yang memadai sesuai dengan ketentuan bank.
- e. Dampak Eksternal: Faktor-faktor eksternal seperti fluktuasi ekonomi dan daya beli masyarakat yang menurun turut memengaruhi kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya.

Beberapa hambatan yang ditemukan dalam penyaluran KUR di BRI KC Duri termasuk prosedur yang relatif rumit dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk proses verifikasi. Selain itu, faktor eksternal seperti ketidakstabilan ekonomi dan ketidakpastian pasar juga memengaruhi kemampuan debitur untuk melunasi kredit mereka, yang dapat menyebabkan kegagalan dalam pembayaran.

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di BRI KC Duri menghadapi berbagai hambatan yang mempengaruhi efektivitas program ini. Hambatan-hambatan ini berpengaruh langsung terhadap kecepatan dan kelancaran penyaluran KUR. Proses verifikasi yang lama dapat menyebabkan keterlambatan dalam pencairan dana, sedangkan ketidakstabilan ekonomi dapat meningkatkan risiko gagal bayar dari debitur, yang berpotensi menambah jumlah kredit macet.

Faktor penyebab hambatan ini mencakup keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam melakukan analisis mendalam terhadap usaha debitur, serta keterbatasan infrastruktur teknologi untuk mendukung digitalisasi proses-proses tertentu dalam penyaluran KUR.

Persyaratan administratif yang kompleks, seperti keharusan menyediakan laporan keuangan lengkap dan izin usaha, seringkali menjadi kendala bagi UMKM dalam mengakses KUR.<sup>18</sup> Kurangnya pemahaman debitur mengenai prosedur pengajuan kredit juga memperburuk situasi, mengakibatkan kesulitan dalam penyusunan dokumen yang diperlukan. Hambatan administratif dan kurangnya literasi keuangan di kalangan UMKM merupakan faktor signifikan yang menghalangi akses terhadap pembiayaan formal.<sup>19</sup>

Dari perspektif hukum bisnis, risiko kredit bermasalah (*Non-Performing Loan/NPL*) menjadi perhatian utama bagi

<sup>18</sup> Siska Queentasar., "Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Tanpa Collateral/Agunan (Studi Kasus PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Wonogiri)," 2023.

<sup>19</sup> Christian Evani. Singal, "Aspek Hukum Pemberian Kredit Usaha Rakyat Tanpa Jaminan/Agunan Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara," *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 75–90.

bank. Keterlambatan pembayaran angsuran oleh debitur dapat menimbulkan implikasi hukum dan finansial yang serius bagi lembaga keuangan. Untuk mengatasi hal ini, BRI KC Duri melakukan pendekatan langsung kepada debitur dan menawarkan opsi restrukturisasi kredit. Pendekatan yang menekankan pentingnya strategi mitigasi risiko dalam penyaluran KUR untuk menjaga kesehatan portofolio kredit bank.<sup>20</sup>

Selain itu, minimnya jaminan yang dapat disediakan oleh debitur dan dampak eksternal seperti fluktuasi ekonomi serta penurunan daya beli masyarakat turut mempengaruhi kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Faktor-faktor eksternal dan keterbatasan agunan menjadi tantangan signifikan dalam penyaluran KUR kepada UMKM. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum bisnis yang adaptif dan fleksibel, termasuk penyesuaian kebijakan agunan dan evaluasi risiko yang komprehensif, untuk memastikan bahwa penyaluran KUR dapat berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan pemberdayaan UMKM.<sup>21</sup>

#### 4. Solusi untuk Mengatasi Hambatan

Untuk mengatasi hambatan tersebut, Bank BRI KC Duri menerapkan beberapa solusi, seperti:

- a. Peningkatan Edukasi: Memberikan edukasi kepada pelaku UMKM mengenai tata cara pengajuan kredit

dan persyaratan administratif yang diperlukan.

- b. Restrukturisasi Kredit: Memberikan opsi restrukturisasi kredit, seperti perpanjangan jangka waktu pembayaran atau penyesuaian angsuran, untuk membantu debitur yang menghadapi kesulitan keuangan.
- c. Fleksibilitas dalam Penilaian: Menerapkan kebijakan yang lebih fleksibel dalam menilai kelayakan kredit, dengan mempertimbangkan kondisi spesifik dari masing-masing debitur.
- d. Pendampingan Usaha: Bank memberikan pendampingan bagi debitur untuk meningkatkan kapasitas manajerial dan efisiensi operasional usaha mereka.
- e. Pengawasan Berkelanjutan: Melakukan monitoring rutin terhadap penggunaan dana oleh debitur untuk memastikan keberlanjutan usaha dan kelancaran pembayaran.

Dalam mengatasi hambatan dalam penyaluran KUR, salah satu solusi yang diusulkan adalah pengembangan sistem digital untuk mempercepat proses verifikasi dan analisis kelayakan. Pelatihan bagi sumber daya manusia dalam hal pengelolaan data dan penggunaan sistem digital juga sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses penyaluran KUR.

Restrukturisasi kredit dan penerapan kebijakan yang fleksibel dalam penilaian kelayakan debitur juga menjadi solusi penting. Dengan restrukturisasi seperti perpanjangan waktu pembayaran atau penyesuaian angsuran, bank dapat mencegah kredit bermasalah yang dapat membahayakan kesehatan portofolio kreditnya. Fleksibilitas dalam penilaian kredit, seperti mempertimbangkan kondisi spesifik debitur, menunjukkan adaptasi

<sup>20</sup> Yudi Dwi Chayadi and Windirah Nola, "Mitigasi Risiko Kredit Pada Penyaluran KUR di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Bisnis* 2, no. 3 (2021): 25–38.

<sup>21</sup> Perwirasari and Ikrardini, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Non Agunan Ditinjau Dari Sisi Hukum Perikatan (Studi Kasus Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Padalarang)," *Jurnal Dialektika Hukum* 2, no. 2 (2020): 148–172.

kebijakan yang relevan dengan pendekatan hukum bisnis modern.<sup>22</sup> fleksibilitas kebijakan ini tidak hanya membantu debitur tetapi juga melindungi kepentingan bank dalam jangka panjang, mengurangi risiko litigasi atau konflik hukum terkait kredit bermasalah.

Peningkatan edukasi kepada pelaku UMKM mengenai tata cara pengajuan kredit dan persyaratan administratif merupakan langkah awal yang penting. Edukasi ini membantu meningkatkan literasi keuangan dan pemahaman debitur terkait prosedur pengajuan kredit, sehingga dapat meminimalkan kesalahan administratif. peningkatan literasi keuangan di kalangan pelaku usaha mikro adalah kunci untuk memastikan penyaluran kredit berjalan efektif sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Edukasi ini juga selaras dengan pendekatan hukum bisnis yang menekankan perlindungan terhadap hak-hak debitur dan akuntabilitas bank.<sup>23</sup>

Pendampingan usaha dan pengawasan berkelanjutan yang diterapkan oleh BRI KC Duri. Dengan memberikan pendampingan kepada debitur untuk meningkatkan kapasitas manajerial dan operasional, bank membantu memastikan keberlanjutan usaha mereka. Selain itu, pengawasan rutin terhadap penggunaan dana debitur menunjukkan penerapan sistem monitoring yang transparan.<sup>24</sup> Langkah-langkah ini tidak hanya mencerminkan upaya bank dalam melindungi investasi mereka tetapi juga

mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas hukum dalam operasional bisnis. Dengan pendekatan ini, penyaluran KUR tidak hanya menjadi alat pemberdayaan ekonomi tetapi juga menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak.

BRI KC Duri telah mulai mengadopsi beberapa solusi yang diusulkan, seperti penggunaan sistem informasi yang lebih terintegrasi untuk mempercepat proses analisis. Namun, beberapa solusi seperti digitalisasi penuh dalam proses verifikasi belum diterapkan secara menyeluruh.

## 5. Studi Kasus Keberhasilan dan Kegagalan Penyaluran KUR

Pada tahun terakhir, Bank BRI KC Duri berhasil menyalurkan KUR kepada lebih dari 300 debitur dengan total nominal mencapai Rp15 miliar. Salah satu contoh keberhasilan adalah seorang pelaku usaha bidang makanan olahan yang mampu meningkatkan omset hingga 150% setelah mendapatkan modal kerja dari KUR. Dengan tambahan modal tersebut, debitur berhasil memperluas jangkauan pasar, meningkatkan kapasitas produksi, dan memperkenalkan inovasi produk baru. Dukungan ini menjadi bukti nyata bahwa akses pembiayaan yang tepat dapat mendorong pertumbuhan UMKM secara signifikan.<sup>25</sup>

Namun, tidak semua kasus berakhir dengan keberhasilan. Salah satu debitur mengalami kegagalan usaha akibat ketidaksanggupan dalam mengelola anggaran. Usaha tersebut mengalami kerugian besar akibat ketidakstabilan harga bahan baku dan penurunan permintaan pasar. Meskipun bank telah melakukan restrukturisasi kredit untuk mengurangi

<sup>22</sup>Usnadi dan Sili., "Kajian Hukum Kebijakan Restrukturisasi Kredit Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Terdampak COVID-19." Vol. 9, No. 3, Edisi Agustus 2021," *Jurnal Education and Development* 9, no. 3 (2021)..

<sup>23</sup>Suryo Wibowo Widiyo, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Kepada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Oleh Bank Umum," *Jurnal Notarius* 5, no. 2 (2020).

<sup>24</sup>Dian Cahyaningrum, "Peran Bank Dalam Pelindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Terdampak Covid-19," *Negara Hukum* 12, no. 1 (2021): 1–15..

<sup>25</sup> and Nyoman Ari Surya Darmawan Wayan Arsane, "Prosedur Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)," *Widya Akuntansi Dan Keuangan* 3, no. 2 (2021): 58–63.

beban debitur, termasuk perpanjangan jangka waktu pembayaran dan pengurangan suku bunga, debitur tetap gagal melunasi pinjaman karena masalah manajemen yang berkelanjutan.<sup>26</sup>

Kasus lainnya menunjukkan bahwa beberapa pelaku UMKM yang memiliki kemampuan manajerial rendah sering kali menghadapi kesulitan dalam memanfaatkan modal secara efektif. Banyak dari mereka tidak memiliki perencanaan bisnis yang matang, sehingga dana yang diterima tidak digunakan untuk keperluan yang sesuai. Hal ini menyoroti perlunya pendampingan dan pelatihan intensif dari pihak bank, khususnya dalam hal manajemen keuangan, strategi pemasaran, dan pengelolaan risiko bisnis.<sup>27</sup>

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Bank BRI KC Duri telah memulai beberapa inisiatif, termasuk program pelatihan khusus untuk debitur UMKM. Program ini dirancang untuk meningkatkan literasi keuangan, membantu pelaku usaha menyusun rencana bisnis yang realistis, dan membangun kemampuan mereka dalam menghadapi dinamika pasar. Selain itu, bank juga berkolaborasi dengan instansi pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk menyediakan mentor bisnis yang dapat mendampingi pelaku usaha dalam mengatasi hambatan operasional.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Riskha A. Lubis and Maryanto, "Outcome Measures Non-Performing Loans on BPR Sejahtera Klaten of Central Java," *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 3 (2020): 779–784.

<sup>27</sup> Miryam Alawiyah, "Pengaruh Non Performing Loan, Loan to Deposit Ratio, Dan Net Interest Margin Terhadap Profitabilitas (Studi Pada PT BPR Di Kabupaten Jember)," *Counting: Journal of Accounting* 3, no. 3 (2021): 108–115..

<sup>28</sup> Israil Jayalangi dan La Ode Sabirila lapangga, "Pengaruh Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pada Nasabah BRI Unit Masama," *Jurnal Ilmiah Clean Government* 5, no. 1 (2022): 16–30.

Pembelajaran yang dapat diambil dari kasus-kasus ini adalah pentingnya tidak hanya melakukan verifikasi berdasarkan data finansial, tetapi juga mempertimbangkan faktor eksternal yang mempengaruhi usaha. Selain itu, pendampingan kepada debitur sangat diperlukan untuk meningkatkan kemungkinan keberhasilan usaha mereka.

Dengan langkah-langkah ini, Bank BRI KC Duri berharap dapat meningkatkan keberhasilan penyaluran KUR dan memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam program ini menjadi pelajaran berharga untuk terus menyempurnakan mekanisme penyaluran kredit dan memperkuat dampaknya bagi UMKM..

## 6. Penguatan Implementasi Asas Pruden Banking

Penguatan asas pruden banking di Bank BRI KC Duri dilakukan dengan memastikan bahwa setiap tahapan pemberian kredit dilaksanakan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Upaya ini mencakup:

- a. Pengelolaan Risiko: Bank BRI KC Duri mengidentifikasi risiko kredit melalui analisis yang mendalam terhadap calon debitur, melibatkan tinjauan terhadap riwayat kredit, kemampuan membayar, dan stabilitas usaha. Analisis ini mencakup evaluasi faktor internal dan eksternal yang dapat memengaruhi kelayakan usaha debitur.
- b. Verifikasi Ketat: Semua dokumen dan informasi yang diberikan oleh calon debitur diverifikasi secara cermat. Proses ini tidak hanya memastikan keabsahan dokumen, tetapi juga mencegah

- penyalahgunaan dana dengan mendeteksi potensi penipuan atau data yang tidak valid. Verifikasi dilakukan melalui sistem digital yang memungkinkan cross-check data secara real-time dengan basis data perbankan nasional.
- c. Pengawasan Transparan: Bank memastikan penggunaan dana KUR diawasi secara transparan melalui pelaporan berkala dari debitur. Selain itu, tim pengawasan melakukan kunjungan lapangan untuk memeriksa langsung implementasi penggunaan dana. Transparansi ini juga mencakup komunikasi terbuka dengan debitur, sehingga mereka memahami tanggung jawab finansial mereka.
  - d. Penerapan Teknologi: Bank BRI KC Duri memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi proses pemberian kredit. Sistem informasi manajemen keuangan debitur memungkinkan pemantauan otomatis terhadap arus kas usaha, sehingga bank dapat memberikan peringatan dini jika terdeteksi risiko kegagalan pembayaran. Teknologi juga digunakan untuk mempercepat analisis kredit dan memberikan hasil yang lebih akurat.
  - e. Kolaborasi dengan Pihak Eksternal: Bank BRI KC Duri bekerja sama dengan instansi pemerintah, lembaga pelatihan, dan organisasi non-pemerintah untuk memberikan pelatihan kepada debitur. Program pelatihan mencakup manajemen keuangan, strategi pemasaran, dan pengembangan produk. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas usaha debitur, sehingga mereka dapat lebih mandiri dalam mengelola bisnis dan menghadapi tantangan pasar.
  - f. Pemberdayaan Digital untuk Debitur: Selain memanfaatkan teknologi untuk internal bank, BRI KC Duri juga memperkenalkan platform digital kepada debitur untuk membantu mereka mengelola keuangan usaha. Platform ini mencakup fitur pencatatan transaksi, laporan laba rugi, dan pengingat jatuh tempo pembayaran kredit.
- Upaya penguatan ini tidak hanya menjaga kesehatan portofolio kredit bank, tetapi juga mendukung pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan. Dengan kombinasi teknologi, pelatihan, dan pengawasan yang terintegrasi, Bank BRI KC Duri memastikan bahwa prinsip kehati-hatian menjadi dasar yang kokoh dalam semua proses pemberian kredit.
- Berdasarkan temuan penelitian, implementasi asas prudensial dapat diperkuat dengan meningkatkan penggunaan teknologi dan data analitik untuk mempercepat proses verifikasi dan meminimalkan kesalahan manusia. Penguatan penerapan analisis risiko yang berbasis data juga akan membantu dalam mengidentifikasi potensi masalah lebih dini. Rekomendasi Kebijakan untuk Pengembangan KUR, antara lain:
1. Peningkatan Akses Informasi: Penyediaan informasi yang lebih luas tentang KUR melalui platform digital dan media sosial untuk menjangkau lebih banyak pelaku UMKM.
  2. Digitalisasi Proses Pengajuan: Memanfaatkan teknologi digital untuk menyederhanakan proses pengajuan kredit, sehingga lebih cepat dan efisien.
  3. Insentif untuk Debitur Berprestasi: Memberikan insentif kepada debitur yang berhasil melunasi pinjaman tepat waktu, seperti

pengurangan suku bunga atau akses ke pembiayaan tambahan.

4. Pengembangan Program Pendampingan: Meningkatkan intensitas pendampingan melalui program mentoring dan pelatihan berkelanjutan bagi debitur.
5. Diversifikasi Produk KUR: Menawarkan skema pembiayaan yang lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan spesifik pelaku UMKM di berbagai sektor.

Dengan implementasi yang konsisten terhadap asas pruden banking, Bank BRI KC Duri tidak hanya melindungi kepentingan bank, tetapi juga mendukung pengembangan UMKM sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional. Hal ini menunjukkan bahwa asas kehati-hatian menjadi landasan utama dalam menciptakan ekosistem keuangan yang stabil dan inklusif.

Selain itu, rekomendasi yang dapat diberikan untuk Bank BRI adalah mengembangkan sistem berbasis teknologi yang lebih terintegrasi dan mempermudah akses informasi untuk analisis risiko. Selain itu, pelatihan intensif untuk staf terkait dengan pengelolaan data dan penerapan prinsip prudensial secara lebih menyeluruh akan sangat membantu dalam memperkuat implementasi asas kehati-hatian dalam penyaluran KUR.

Secara keseluruhan, pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian KUR di Bank BRI KC Duri telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan UMKM. Namun, tantangan seperti hambatan administratif dan risiko eksternal masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Dengan strategi yang adaptif dan penguatan implementasi asas pruden banking, Bank BRI KC Duri dapat terus mendukung pengembangan UMKM

sekaligus menjaga stabilitas keuangan institusi

## Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan mengenai Implementasi Asas Pruden Banking Dalam Pemberian Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kepada Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang KC Duri dapat disimpulkan, antara lain:

1. Implementasi penyaluran KUR di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang KC Duri dilakukan dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian dan analisis yang mendalam terhadap calon debitur. Proses ini mencakup langkah-langkah seperti evaluasi karakter debitur, kemampuan finansial, modal yang dimiliki, jaminan yang diserahkan, dan kondisi usaha. Bank menerapkan pendekatan berbasis analisis 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) untuk memastikan bahwa hanya debitur yang memenuhi kriteria yang dapat menerima pinjaman KUR. Dengan adanya prosedur yang ketat, bank berusaha meminimalkan risiko kredit bermasalah dan memastikan bahwa KUR dapat memberikan manfaat yang maksimal baik bagi debitur maupun bank itu sendiri.
2. Dalam pelaksanaannya prosedur tersebut belum maksimal di laksanakan, masih ada pelaksanaan yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur sehingga menimbulkan adanya hambatan. Hambatan utama dalam penyaluran KUR kepada UMKM di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Kantor Cabang KC Duri antara lain adalah ketidaklengkapan dokumen administratif dari calon debitur, seperti laporan keuangan, izin usaha, atau dokumen pendukung lainnya. Banyak pelaku UMKM, terutama yang baru memulai usaha, kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh bank. Selain itu, sebagian pelaku UMKM tidak terbiasa dengan prosedur ketat yang berlaku di perbankan. Solusi untuk hambatan penyaluran KUR di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang KC Duri antara lain penyempurnaan regulasi KUR agar lebih fleksibel, dengan mempermudah verifikasi dokumen dan proses administratif. Pemberian pelatihan dan pendampingan kepada pelaku UMKM juga penting untuk memahami persyaratan dan menyusun dokumen yang dibutuhkan. Selain itu, meningkatkan komunikasi antara bank dan pelaku UMKM dapat menyederhanakan proses aplikasi KUR tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian.

3. Upaya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang KC Duri untuk meningkatkan penyaluran KUR kepada UMKM dibagi dalam dua pendekatan: preventif dan represif. Pendekatan preventif dilakukan dengan menganalisis calon debitur menggunakan 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition) untuk memastikan kelayakan kredit dan memitigasi risiko. Sedangkan pendekatan represif diambil jika kredit bermasalah, seperti restrukturisasi atau tindakan hukum untuk

memastikan pembayaran. Kedua pendekatan ini bertujuan untuk mempermudah penyaluran KUR dan mendukung keberhasilan UMKM.

### Daftar Pustaka

- Alawiyah, Miryam. "Pengaruh Non Performing Loan, Loan to Deposit Ratio, Dan Net Interest Margin Terhadap Profitabilitas (Studi Pada PT BPR Di Kabupaten Jember)." *Counting: Journal of Accounting* 3, no. 3 (2023): 108–115.
- Baneftar, Frengky. "Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Dengan Jaminan Sertifikat Tanah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996: Studi Pada Bank Papua Cabang Biak." *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 3, no. 1 (2020): 17–40.
- Budihardja, Georgius Ivan. "Kebijakan Restrukturisasi Kredit Oleh Bank Terhadap Debitur UMKM Terdampak Langsung Maupun Tidak Langsung Pandemi Covid-19." *Jurist-Diction* 5, no. 4 (2022): 1313–1346.
- Dian, Cahyaningrum, "Peran Bank Dalam Pelindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Terdampak Covid-19." *Negara Hukum* 12, no. 1 (2022): 1–15.
- Gilbert, Felix Sevanov, and Wiji Setiyani. "Pemberdayaan UMKM Sebagai Penggerak Pemulihan Ekonomi Nasional Melalui Optimalisasi Digital 4.0." *Global Komunika* 5, no. 1 (2022).
- Hadi Rahman. "Ragam Pengaduan Masyarakat Dalam Penyaluran KUR." *ombudsman RI* (2023).
- Hakam Ahmad, Sri Anggraini, dan Gesang Iswahyudi. "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Rahasia Bank

- Dalam Menjaga Kepentingan Nasabah Perbankan.” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 337–350.
- Jayalangi, La Ode Sabirila lapangga, Israil. “Pengaruh Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pada Nasabah BRI Unit Masama.” *Jurnal Ilmiah Clean Government* 5, no. 1 (2022): 16–30.
- Kholifah, A, and T Andini. “Peran UMKM Terhadap Perekonomian Di Indonesia.” *Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 3, no. 2 (2024): 459–466.
- Lapangga, Israil. “Pengaruh Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pada Nasabah BRI Unit Masama.” *Jurnal Ilmiah Clean Government* 5, no. 1 (2022).
- Lubis, Riskha A., and Maryanto. “Outcome Measures Non-Performing Loans on BPR Sejahtera Klaten of Central Java.” *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 3 (2020): 779–784.
- Maisa. “Analisis Yuridis Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.” *Maleo Law Journal* 2, no. 2 (2020).
- Ikrardini dan Perwirasari “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Non Agunan Ditinjau Dari Sisi Hukum Perikatan (Studi Kasus Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Padalarang).” *Jurnal Dialektika Hukum* 2, no. 2 (2022): 148–172.
- Muhammad Iqbal Fasa dan Pramesti Harmar,. “Peran Perbankan Syariah Dalam UMKM Untuk Mengembangkan Ekonomi Indonesia.” *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan* 5, no. 1 (2022): 68–77.
- Prasetyani, Erni, Ai Neti Sumidartini, Endro Andayani, and Vikaliana Resista. “Efektivitas ‘Digital Lending’ Pada Lending Model (Studi Kasus Kredit Usaha Rakyat Bank Mandiri).” *Abiwara: Jurnal Vokasi Administrasi Bisnis* 5, no. 2 (2024): 127–134.
- Queentasar., Siska. “Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Tanpa Collateral/Agunan (Studi Kasus PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Wonogiri),” 2023.
- Singal, Christian Evani. “Aspek Hukum Pemberian Kredit Usaha Rakyat Tanpa Jaminan/Agunan Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara.” *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 75–90.
- Siswanto, Ade Hari. “Perlindungan Hukum Digitalisasi Transaksi Keuangan (Financial Technology) Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.” *Lex Jurnalica* 1, no. 1 (2022): 1–15.
- Suginam, Sri Rahayu, and Elvitrianim Purba. “Efektivitas Penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) Untuk Pengembangan UMKM.” *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)* 3, no. 1 (2021): 21–28.
- Usnadi, and Sili. “Kajian Hukum Kebijakan Restrukturisasi Kredit Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Terdampak COVID-19.” Vol. 9, No. 3, Edisi Agustus 2021.” *Jurnal Education and Development* 9, no. 3 (2022).
- Wayan Arsane, and Nyoman Ari Surya Darmawan. “Prosedur Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).” *Widya Akuntansi Dan Keuangan* 3, no. 2 (2021): 58–63.

---

Widiyo, Suryo Wibowo. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Kepada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Oleh Bank Umum." *Jurnal Notarius* 5, no. 2 (2020).

Yakub. "Analisis Proses Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Guna Meminimalisir Nasabah NPL (Non-Performing Loan) Pada PT. Bank Sulselbar Cabang Sidrap, "." *Community Development Journal* 5, no. 5 (2024 5, no. 5 (2024).

Yudi Dwi Chayadi dan Windirah Nola. "Mitigasi Risiko Kredit Pada Penyaluran KUR Di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Bisnis* 2, no. 3 (2023): 25–38.